

Gerakan Penghematan Harus Sistematis

Jakarta, Kompas - Pemerintah akan kembali mencanangkan gerakan penghematan energi. Hal ini terkait dengan membengkaknya subsidi bahan bakar minyak yang kini mencapai lebih dari Rp 120 triliun per tahun.

Semua instansi pemerintah diimbau mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Selain itu, menghidupkan pendingin ruangan 10 menit setelah masuk ruangan dan mematikan 10 menit sebelum keluar.

Arya Rezavidi, Ketua Bidang Teknologi dan Edukasi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Senin (1/8), berpendapat, gerakan ini bersifat politis dan tidak akan bertahan lama, seperti empat tahun lalu.

Pencanangan hemat energi pernah dilakukan pada 2007, menekankan pada penghematan listrik di kantor pemerintah.

Bahkan di Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), demikian Arya, diadakan apel "penghematan energi".

Namun, gerakan ini bertahan tidak sampai setahun dan tidak berdampak pada kebiasaan hemat konsumsi energi dan listrik.

Menurut Rinaldy Dalimi, anggota Dewan Energi Nasional, gerakan ini harus berkelanjutan dan berjangka panjang. Gerakan ini, kata dia, harus menyentuh dunia pendidikan. Pesan hemat energi harus masuk ke dalam kurikulum dan proses pendidikan sehingga menghasilkan manusia yang menjadikan penghematan energi sebagai kebiasaan dan karakter. Sifat hemat juga harus dimulai dari para pemimpin sebagai panutan dan orang berada.

Kajian energi

Menurut Arya, yang pernah menjadi Direktur Teknologi Konservasi dan Konversi Energi BPPT, jika pemerintah ingin melakukan penghematan energi dan mengurangi subsidi BBM harus dilihat sektor yang paling boros menggunakan energi dan menyerap subsidi terbesar.

"Kajian BPPT tahun 2005 menunjukkan, sektor yang paling boros energi adalah transportasi. Jika ingin menghemat, sektor itulah yang harus dibenahi," kata Arya yang kini Ketua Pusat Audit Teknologi BPPT.

Pembenahan sektor transportasi dilakukan pada sistem, mulai dari penggantian truk atau kontainer dengan kereta untuk pengangkutan barang jarak jauh. Kereta dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan jalan, serta mengatasi kerusakan jalan.

Langkah lain, mengurangi konsentrasi penduduk di kota besar. Perlu pemindahan pabrik atau industri ke luar kota besar dan luar Jawa. Hal ini perlu didukung dengan prasarana dan sarana angkutan yang memadai. Dengan begitu, ada pemerataan beban lingkungan. (YUN)